



**Kampus
Merdeka**
INDONESIA JAYA

THE ROLE OF MANDATORY OF MANDATORY CURRICULUM COURSES (MKWK)
IN IMPLEMENTING THE DIRECTOR GENERAL OF HIGHER EDUCATION DECREE NUMBER 84/E/KPT/2020

Baidhillah Riyadhi
Didik M. Nur Haris
Khamim

AFFILIATES : POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK

INTRODUCTION

PERAN PENGELOLA MATA KULIAH WAJIB KURIKULUM (MKWK) DALAM MENGIMPLEMENTASIKAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI NOMOR 84/E/KPT/2020

1960
MKU

1983
MKDU

1990
MKU

2000
MKP

2012
MKWU

2020
MKWK

Polnep membentuk koordinator MKWK pada tahun 2022 berdasarkan SK Direktur Nomor: 0284/PL16/kep/2022

METHOD

Metode penelitian dalam riset ini berupa metode kualitatif. Dengan lokasi penelitian pada Politeknik Negeri Pontianak. Adapun Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Observasi Partisipatif dengan melakukan pengamatan terhadap objek yang diteliti, baik yang bersifat ucapan ataupun perbuatan serta berpartisipasi aktif dalam aktivitas mereka.
- b. Studi dokumentasi, dengan mendokumentasikan semua proses yang akan dilakukan dalam penelitian.
- c. Wawancara, dilakukan terhadap narasumber yang kompeten untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini.



ICOGEN

INTERNATIONAL CONFERENCE
ON GENERAL EDUCATION



Kampus
Merdeka
INDONESIA JAYA

RESULT

Dalam pelaksanaan MKWK di Polnep ditemukan beberapa permasalahan, diantaranya yaitu sebagai berikut:

- a. Belum seimbangnya rasio dosen MKWK dengan jam perkuliahan MKWK.
- b. Ditemukan dosen MKWK yang berlatar belakang pendidikan bukan MKWK.
- c. Penjadwalan MKWK belum berimbang pada semester ganjil dan semester genap.

DISCUSSION

Keberadaan lembaga pengelola MKWK di lingkungan perguruan tinggi memiliki peran yang strategis dalam merealisasikan cita-cita bangsa. Hal ini dapat dilihat dari berbagai landasan aspek yuridis, diantaranya, Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Nomor 84/E/KPT/2020 Pasal 35 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia No. 12/2012 tentang Asas-Asas Pendidikan Tinggi, pada Pasal 3 ditegaskan, “e. Asas Mental; Perguruan tinggi harus berorientasi untuk kemajuan peradaban dan kesejahteraan manusia. f. Asas Kebajikan; Perguruan tinggi harus mendatangkan kebaikan, keselamatan, dan kesejahteraan dalam kehidupan sivitas akademik masyarakat Bangsa Negara.”

Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 84/E/KPT/2020 secara eksplisit dimaksudkan untuk membentuk watak dan keadaban Mahasiswa yang bermartabat. Selanjutnya, secara implisit terkandung misi penguatan proses ***Nation and Character Building*** sebagai amanah Bung Karno dan terwujudnya koherensi antara karakter negara Pancasila dengan karakter warga negara.

Kelembagaan MKWK secara eksplisit juga terkandung pada pasal 61 tentang Organisasi Penyelenggaraan Perguruan Tinggi, pada Ayat 2: “(1) Penyusun Kebijakan, (2) Pelaksana Akademik, (3) Pengawas dan Penjaminan Mutu, (4) Penunjang Akademik atau sumber belajar, (5) Pelaksana Administrasi atau Tata Usaha.”

CONCLUSION

1. Penyelenggaraan Mata Kuliah wajib kurikulum akan lebih tertib dan berhasil, jika dikelola oleh organisasi khusus yang mengelola MKWK.
2. Peran pengelola MKWK sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi nomor 84/e/kpt/2020 akan dapat diwujudkan dengan adanya kebijakan dan perhatian pengelola Perguruan tinggi atas pentingnya MKWK.

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat:

- a. Memperkuat eksistensi pengelolaan MKWK di Politeknik Negeri Pontianak.
- b. Mengevaluasi efektivitas pengelolaan MKWK di Politeknik Negeri Pontianak.
- c. Merumuskan pengelolaan MKWK sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi nomor 84/e/kpt/2020.